

MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Perkembangan Konsep Kemiskinan

Kemiskinan sangat identik dengan beberapa variabel berikut ini:

- Kepemilikan modal
- Kepemilikan lahan
- Sumber daya manusia
- Kekurangan gizi
- Pendidikan
- Pelayanan kesehatan
- Perndapatan perkapita
- Minimnya investasi

Parameter Kemiskinan :

- W. SCOTT (1979) : Kemiskinan diukur dari pendapatan rata-rata perkepala (*income percapita*)
- A. SEN (1977) : Melihat dari kebutuhan dasar (*basic needs*)
- WORLD BANK : Mengukur kemiskinan dengan mematok minimal pengeluaran US\$ 1 per hari. Jika dibawah itu termasuk kategori kemiskinan absolut.
- UNDP (United Nations Developed Program) : mengukur kemiskinan dengan melihat Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index –HPI*)

UNDP → kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three Key Deprivations*), yaitu :

1) Kehidupan

(lebih dari 30% penduduk negara-negara berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun)

2) Pendidikan Dasar

(dilihat dari presentasi tingkat penduduk dewasa yang buta huruf, dan seterusnya)

1) Ketetapan Ekonomi

(dilihat dari jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses kesehatan, jumlah anak-anak dibawah 5 tahun yang kekurangan berat badan)

Sudut Pandang mengukur Kemiskinan:

- SAYOGO (1997) : melihat atau mengukur kemiskinan dari tingkat konsumsi beras perkapita pertahun:
 - Jika konsumsi dibawah 420 kg untuk kota = miskin
 - Jika Konsumsi dibawah 320 kg untuk pedesaan = miskin

Biro Pusat Statistik (BPS) :

Kemisikinan dilihat atau diukur dari jumlah pengeluaran tiap bulan.

Entang Sastraatmadja (2003):

Kemiskinan
dilihat dari
tingkat
Pendapatan :

Kemiskinan ABSOLUT :

Yaitu kemiskinan karena pendapatannya dibawah jumlah minimum UMR

Kemiskinan RELATIF :

Yaitu Kemiskinan karena hidup dengan pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

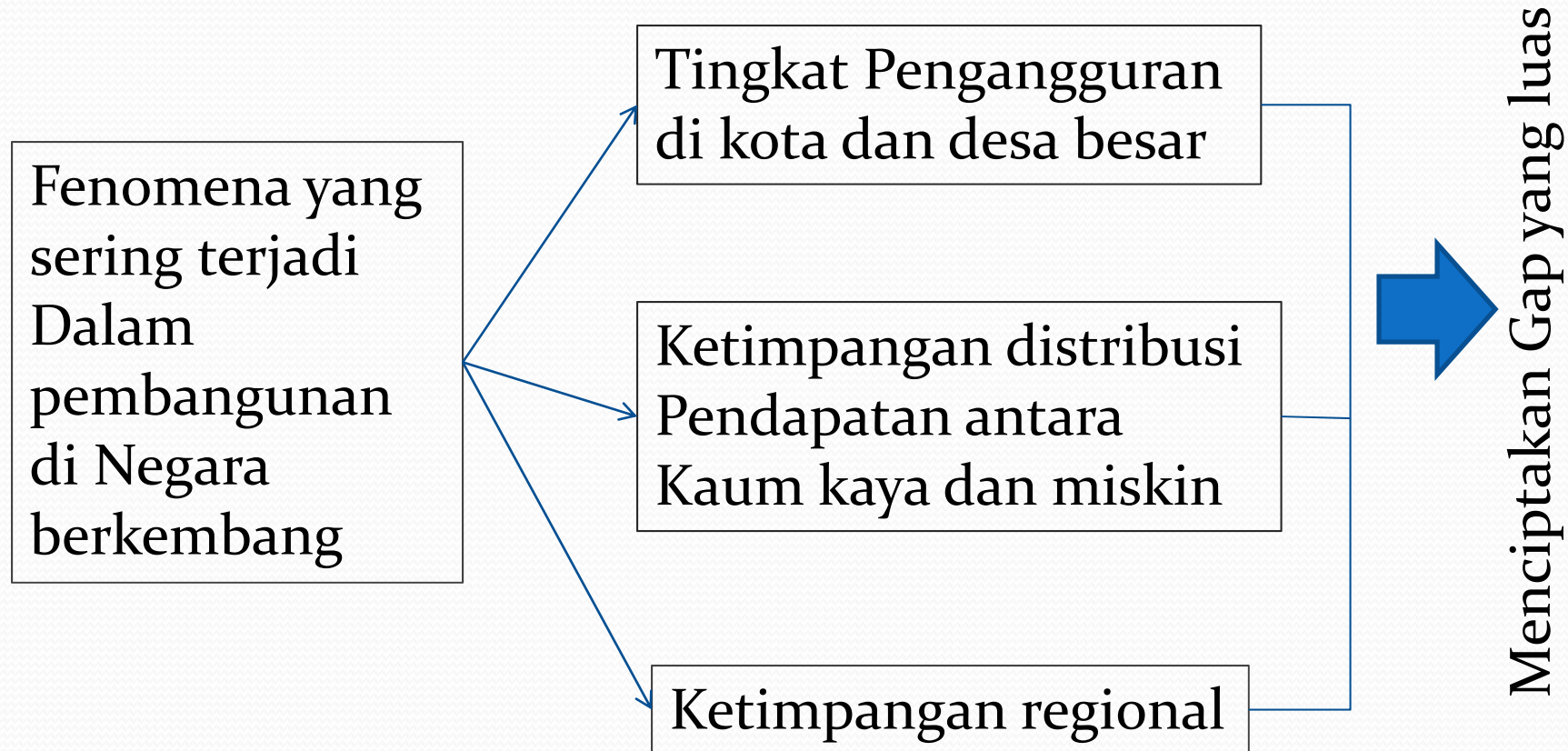
Kemiskinan dilihat atau diukur dari berdasarkan pola waktu (sastraatmadja; 2003) :

1. **PERSISTENT POVERTY**, yakni kemiskinan yang kronis atau terjadi secara turun temurun.
2. **CYCLICAL POVERTY**, yaitu kemiskinan yang terjadi karena mengikuti siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. **SEASONAL POVERTY**, yaitu kemiskinan musiman yang terjadi berdasarkan masa-masa tertentu, misalnya masa panceklik bagi petani, dst.
4. **ACCIDENT POVERTY**, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik & kekerasan atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan suatu masyarakat.

KARAKTERISTIK EKONOMI PENDUDUK MISKIN :

1. Ada generalisasi (anggapan sederhana), bahwasanya penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional tersebut.
2. Bahwasanya kemiskinan itu banyak diderita oleh kaum wanita beserta anak-anak.
3. (a) kondisi minor yang diderita etnis minoritas (b) tingginya tingkat kemiskinan dalam kelompok pribumi.

MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA



KONDISI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

- Semakin Timur, pembangunan semakin tidak merata, sehingga ketimpangan pembangunan sangat kerasa
- Upaya-upaya pengentasan kemiskinan tidak selalu membuahkan hasil, misalnya:
 - Untuk mengelola ekonomi, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan “growth with distribution of wealth”, yaitu suatu upaya mengatur ekonomi melalui manajemen sentralistik. Akibatnya daerah atau wilayah kehilangan keberdayaannya.

padahal sekita tahun 1980-an, Indonesia dikenal dengan sebutan macan asia karena berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% pertahun (Repelita III – V)

KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN


- Secara teori, semakin banyak program kemiskinan (penanggulangan) maka jumlah kemiskinan dapat ditekan serendah mungkin.
- Oleh karena itu secara operasional, pemerintah Indonesia menyalurkan dana:
 - DAU (Dana Alokasi Umum)
 - DAK (Dana Alokasi Khusus)
 - Dana Sektoral
 - Dana UKM (Unit Kegiatan Masyarakat)

Namun upaya-upaya diatas ternyata masih kurang berhasil.

- 
- Salah satu penyebab kegagalan penanggulangan kemiskinan, adalah pemerintah belum mempunyai peta masalah serta potensi yang ada di setiap masyarakat.

Program-program Pengentasan Kemiskinan yang Telah dilakukan:

- **IDT (Inpres Desa Tertinggal)**, dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan.
- **INPRES Kesehatan**, bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah untuk penduduk pedesaan.
- **INPRES Pendidikan**, yaitu layanan pendidikan gratis untuk tingkat SD sampai SMP
- **KUT (Kredit Usaha Tani)**, memudahkan petani untuk mendapatkan modal.

- 
- **KCK (Kredit CandaK Kulak)**, memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan modal diluar sektor pertanian.
 - Pemberantasan Pajak untuk hasil pertanian
 - Subsidi atas pupuk dan obat-obatan
 - Operasi beras murah, dst.


REKOMENDASI

Hal-hal atau isu sentral yang harus menjadi fokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan :

- Upaya penganggulangan kemiskinan harus bersifat “*local spesific*”
- Upaya penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah harus diikuti dengan :
 - a) Kebijakan “land reform” melalui aturan daerah
 - b) Terciptanya demokrasi ekonomi rakyat dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan
 - c) Terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai ekonomi rakyat
 - d) Partisipasi kaum wanita dalam pengambilan keputusan harus lebih proporsional

- Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga,
- Harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- Penanganan kemiskinan harus menyentuh dua area sasaran aksi:
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
 - Meningkatkan pelayanan masyarakat
- Penanggulangan kemiskinan => dari masyarakat untuk masyarakat

- Untuk memenuhi demokratisasi dan desentralisasi, maka upaya-upaya tidak boleh lepas dari :
 - Good governance
 - Pembagian pran yang jelas antara pusat – daerah
 - Patnership pemerintah-swasta-civil society
 - Upaya pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan ekonomi
- Era otonomi menuntut strategi penanggulangan :
 - Sederhana
 - Open menu
 - Partisipasi menyeluruh, melibatkan multistake holder.
 - Keterbukaan informasi
 - Pengelolaan program dan dana harus transparan

- 
- Operasional penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan menerapkan:
 - a) Koordinasi
 - b) Katalisasi
 - c) Mediasi
 - d) fasilitasi